

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian Kepolisian Republik Indonesia yang menjadikan POLRI sebagai abdi negara yang profesional, bertanggung jawab sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri, meliputi memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Dalam hal ini polri disini memiliki fungsi dan perannya dalam melaksanakan tugasnya. Jika polri disini taat akan hukum yang berlaku atau taat akan kode etik yang berlaku maka tidak akan terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Polri disini sebagai abdi Negara yang harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dan terhadap anggota polri yang lain. Berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan anggota polri disini akan berdampak buruk bagi anggota polri itu sendiri maupun anggota polri yang lain. Yang berarti dalam hal ini pelanggaran akan terus terjadi jika anggota polri tidak taat akan hukum dan akan mencoreng nama baik polri itu sendiri.

Sebagai perwujudan stabilitas nasional maka pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk aparaturnya keamanan negara. Maka aparaturnya keamanan negara harus dikondisikan dan diposisikan sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Yang dimaksud dengan aparaturnya negara disini salah satunya adalah POLRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dimengerti tentang esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok POLRI, yakni :

- a. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5).

Dari uraian di atas, maka POLRI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk melaksanakan urusan keamanan yang meliputi : perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat, penegakan hukum serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam tiga hal diatas tidak ada yang lebih didahulukan dalam pelaksanaan tugasnya karena memang ketiga hal

tersebut merupakan poin-poin penting yang harus dilakukan oleh POLRI, adapun pelaksanaan di lapangan mana yang harus didahulukan adalah dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat serta lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiganya seharusnya dapat dikerjakan secara beriringan.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang, POLRI telah memberikan bukti yang nyata terhadap masyarakat tentang kemajuan POLRI dalam membangun kekuatan, pembinaan anggota POLRI hingga operasional. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terjadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI yang mengakibatkan citra buruk terhadap POLRI secara keseluruhan. Contoh yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (*abuse of power*) dan melakukan perbuatan yang melanggar kaidah agama, sosial maupun moral.

Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan serta penyimpangan perilaku anggota POLRI di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi POLRI sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Maka berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka selanjutnya peraturan mengenai kode etik POLRI tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dijelaskan dengan jelas dalam pasal 6 hingga pasal 16 apa saja hal hal yang seharusnya dilakukan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan kode etik tersebut. Diantaranya adalah harus dalam posisi netral dalam hal berpolitik, menjalankan tugas secara profesional, prosedural dan proporsional dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Peraturan KAPOLRI dibuat oleh KAPOLRI dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

internal dan eksternal.¹ Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota POLRI saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu memberikan dampak positif bagi perilaku anggota POLRI, serta belum memberikan efek jera kepada anggota lain agar tidak mengikuti jejak negatif rekannya. Baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya, maupun hasil dari penegakan hukum peraturan tersebut.

Upaya penegakan kode etik profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk perwujudan pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme POLRI. Sangat tidak bisa dinalar jika penegakan hukum dalam masyarakat akan berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (POLRI) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan POLRI akan sangat berdampak kurang baik dari sisi kepercayaan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI.

Maka dari itu dibentuklah Komisi Kode Etik POLRI, yang selanjutnya disingkat KKEP. KKEP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan POLRI yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan.²

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Sehingga sebagai pegawai negeri, maka semua perilaku serta tindak tanduk yang dilakukan oleh

¹Syamsudin Jaelani, *Peraturan KAPOLRI*, <http://denaporbrimobpapa.blogspot.com/p/peraturan-kaPOLRI>.

² Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

anggota POLRI tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi POLRI.

Dalam hal terkait pemberian sanksi, ada beberapa sanksi yang diberikan oleh POLRI terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran antara lain sanksi administratif, dilakukan pemindah tugas pada fungsi lain dan juga menetapkan dua jenis sanksi pemberhentian dari keanggotaan POLRI. Terkait pemberian sanksi pemberhentian ini dibedakan menjadi dalam 2 (dua) jenis, yakni pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota POLRI dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
 - a. Mencapai batas usia pensiun;
 - b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.⁴
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
 - a. Melakukan Tindak Pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan

⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶
- c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus

⁵ Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

⁶ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Walaupun ancaman sanksi telah ditetapkan sedemikian rupa, tetapi yang terjadi selama ini pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya masih saja kerap terjadi. Terlepas anggota POLRI adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Tetapi dengan integritas POLRI yang tinggi, seharusnya dapat meminimalisir bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan penelitian ini penulis memilih judul” TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS DI POLRES LAMONGAN)”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik anggota Polri dan jenis pelanggaran yang terjadi di POLRES Lamongan?
2. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran kode etik anggota Polri yang terjadi di POLRES Lamongan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik anggota Polri dan jenis pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh anggota POLRI;
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran kode etik anggota Polri yang dilakukan oleh anggota POLRI;

⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literature bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang penegakan hukum kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya di Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Sarana penyampaian kepada Masyarakat, tentang kinerja POLRI dalam menangani anggota POLRI yang melakukan pelanggaran etik.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku dalam manusia. Dalam hal ini metode dilakukan untuk melihat kondisi hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, yang dimana jika kondisi hukum itu bermasalah maka akan mempengaruhi perilaku manusia yang ada dalam masyarakat tersebut dan juga sebaliknya jika

kondisi hukum itu tetap pada aturannya dan tetap pada porsinya maka tidak akan mempengaruhi perilaku manusia yang ada dalam masyarakat tersebut.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Kepolisian Resor Lamongan. Sedangkan mengenai alasan mengapa memilih tempat penelitian di Lamongan adalah karena mengetahui ada beberapa keluhan masyarakat tentang tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum anggota POLRES Lamongan dan ada beberapa masalah yang dilakukan oleh oknum anggota POLRES Lamongan diantaranya terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota polri pada tahun 2015 – 2018 yaitu terjadinya KDRT, penggelapan dan penipuan, narkoba dan melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali. Informasi yang didapat dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta POLRES Lamongan mudah dijangkau oleh penulis.

3. Jenis data

Jenis data dari penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama dan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari

sumber kedua (sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).

- c. Data tersier, yaitu jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain.

6. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data penulisan ini menggunakan :

- a. Observasi

Observasi dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Lamongan yang memang terjadinya pelanggaran kode etik dan tempat tersebut mudah di jangkau oleh penulis. Yang dimana observasi ini dilakukan untuk mengamati proses aktivitas yang terjadi di lapangan dan mengamati bagaimana kinerja anggota polri dalam hal melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- b. Interview wawancara

Wawancara dilakukan kepada subyek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Yang dimana wawancara ini dilakukan dengan menggali informasi-informasi mengenai oknum anggota polri yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan kode etik yang berlaku dan mencari celah dalam hal penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan KOMPOL Drs. Edy Cahyono Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (KABAG SUMDA) POLRES

Lamongan, Jinato Kasi Propam POLRES Lamongan, Teguh Budiawan Tim Propam POLRES Lamongan.

7. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Analisis Deskriptif Kualitatif yakni mendiskripsikan dan menggambarkan kejadian dari apa yang didapatkan dalam penelitian di lapangan. Yang dimana metode ini juga mencari dan mengumpulkan data yang bersifat pemahaman dan biasanya digunakan untuk memperoleh pendapat, alasan, dan motivasi terhadap anggota polri dalam melaksanakan penegakan kode etik yang berlaku, kemudian dari data ini nantinya diambil sebuah kesimpulan berupa teori atau hipotesis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi latar belakang mengenai permasalahan yang sedang menjadi pembahasan. Disertai dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka, sebagaimana dalam bab II.

BAB IV: Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

